

# Digital citizenship: Peran media sosial dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik di Indonesia

Tazkiya Azizatuddini

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250503110098@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Digital citizenship; media sosial; opini publik; partisipasi politik; demokrasi digital

## Keywords:

Digital citizenship; social media; public opinion; political participation; digital democracy

## ABSTRAK

Era digitalisasi telah mengubah secara fundamental cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial bukan sekadar platform komunikasi, melainkan telah menjelma menjadi ruang publik baru tempat opini politik dibentuk, disebarluaskan, dan dikontestasikan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran media sosial dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi politik warga negara di Indonesia, serta mengkaji relevansi konsep digital citizenship sebagai kerangka normatif yang dibutuhkan untuk

mengoptimalkan potensi demokratis media digital. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), kajian ini menelaah sumber-sumber teoritis dan empiris yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial berperan ganda: di satu sisi ia menjadi instrumen demokratisasi yang memperluas akses informasi dan ruang partisipasi publik, di sisi lain ia rentan dieksploitasi untuk menyebarkan disinformasi, memperparah polarisasi politik, dan mengancam kohesi sosial. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terbukti dalam berbagai kontestasi elektoral. Revitalisasi digital citizenship berbasis nilai Pancasila dipandang sebagai strategi krusial untuk membangun warga negara yang kritis, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital. Implikasi kebijakan meliputi penguatan pendidikan literasi digital dan integrasi nilai kebangsaan dalam ekosistem media sosial.

## ABSTRACT

The era of digitalization has fundamentally transformed how citizens engage in political life. Social media has transcended its role as a mere communication platform to become a new public sphere where political opinions are formed, disseminated, and contested. This article aims to analyze the role of social media in shaping public opinion and fostering citizen political participation in Indonesia, while examining the relevance of digital citizenship as a normative framework needed to optimize the democratic potential of digital media. Using a library research method, this study reviews relevant theoretical and empirical sources. The findings reveal that social media plays a dual role: on one hand, it serves as an instrument of democratization that broadens access to information and public participation; on the other, it is susceptible to exploitation for spreading disinformation, exacerbating political polarization, and undermining social cohesion. In the Indonesian context, this phenomenon has been evident in various electoral contests. The revitalization of digital citizenship grounded in Pancasila values is seen as a crucial strategy for cultivating citizens who are critical, principled, and responsible in their use of digital spaces. Policy implications include strengthening digital literacy education and integrating national values into the social media ecosystem.



## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan pesat telah mengubah lanskap demokrasi secara fundamental. Media sosial, sebagai salah satu produk revolusi digital yang paling berpengaruh, kini hadir bukan sekadar sebagai sarana hiburan atau komunikasi interpersonal, melainkan telah menjelma menjadi ruang publik baru tempat aspirasi politik diartikulasikan, opini publik dikonstruksikan, dan partisipasi warga diaktualisasikan (Nasrullah, 2017). Di Indonesia, fenomena ini semakin nyata seiring meningkatnya penetrasi internet yang mencapai lebih dari 70% populasi, menjadikan bangsa ini sebagai salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia.

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang, kehadiran media sosial membawa implikasi yang bersifat paradoksikal. Di satu sisi, platform digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas, memungkinkan warga negara dari berbagai lapisan sosial untuk terlibat langsung dalam diskursus politik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan bahkan menginisiasi gerakan sosial berbasis daring. Di sisi lain, karakteristik media sosial yang menekankan kecepatan, virality, dan personalisasi algoritmik menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya echo chambers, penyebaran hoaks, dan eskalasi polarisasi politik yang berpotensi mengancam kohesi sosial (Iqbal et al., 2025).

Konsep digital citizenship muncul sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut. (Ribble & Bailey, 2011; Roza, 2020) mendefinisikan kewarganegaraan digital sebagai norma-norma perilaku yang sesuai dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi di era digital. Konsep ini mencakup sembilan elemen mulai dari digital access, digital literacy, hingga digital rights and responsibilities. Dalam konteks Indonesia, revitalisasi digital citizenship tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang menjadi fondasi moral kehidupan berbangsa (Dwiyanti, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari relasi media sosial dan politik di Indonesia. (Iqbal et al., 2025) menganalisis dinamika opini politik masyarakat melalui media sosial dan menemukan bahwa Indonesia menempati posisi tertinggi di Asia dalam penggunaan jejaring sosial sebagai sumber berita politik. (Roza, 2020) mengkaji pentingnya digital citizenship dalam menyiapkan generasi milenial sebagai pelaku demokrasi digital. Sementara itu, (Suciati & Nuqul, 2025) menganalisis secara khusus peran media sosial dalam membangun identitas politik perempuan. Namun, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif digital citizenship dengan analisis peran media sosial dalam pembentukan opini publik dan partisipasi politik di Indonesia masih terbatas.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan tujuan: (1) menganalisis mekanisme media sosial dalam membentuk opini publik dan mendorong partisipasi politik warga negara Indonesia; (2) mengidentifikasi tantangan dan risiko yang ditimbulkan media sosial bagi kualitas demokrasi; dan (3) mengkaji relevansi dan implementasi digital citizenship berbasis nilai Pancasila sebagai strategi pemberdayaan warga negara digital di Indonesia.

## Pembahasan

### Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru dalam Demokrasi Digital

Media sosial pada dasarnya merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten buatan pengguna (user-generated content), serta memfasilitasi interaksi sosial secara masif dan real-time (Kaplan & Haenlein, sebagaimana dikutip dalam (Iqbal et al., 2025)). Definisi ini menempatkan media sosial bukan sebagai media massa konvensional yang bersifat satu arah, melainkan sebagai ekosistem komunikasi yang bersifat dialogis, partisipatif, dan terdesentralisasi.

Dalam perspektif teori demokrasi partisipatori, kehadiran media sosial secara prinsip memperluas dan memperdalam kualitas partisipasi warga negara. (Roza, 2020) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik di era digital mencakup segala kegiatan interaktif berbasis jejaring yang difasilitasi melalui platform daring, seperti membentuk opini publik, menggalang petisi, mengampanyekan isu-isu kebijakan, hingga mengorganisir gerakan sosial. Di Indonesia, generasi milenial yang menjadi pengguna utama media sosial terbukti memiliki peran signifikan dalam dinamika politik kontemporer, termasuk dalam menentukan hasil pemilihan presiden 2019 (Roza, 2020).

(Rasyadan, 2025) menambahkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena pembentukan identitas sosial dan nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah memanfaatkan platform digital seperti akun resmi @indonesiabaik.id untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada publik. Namun demikian, komunikasi satu arah yang minim interaksi menjadi kelemahan utama dari pendekatan ini, sehingga pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan sering kali tidak viral karena kurang menyentuh sisi emosional audiens.

### Dinamika Pembentukan Opini Politik Melalui Media Sosial

#### *Mekanisme dan Faktor yang Mempengaruhi*

Opini publik dalam konteks media sosial terbentuk melalui mekanisme yang kompleks dan berlapis. (Iqbal et al., 2025) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah lanskap politik secara fundamental, di mana karakteristik unik media sosial yang mencakup interaktivitas, kecepatan, dan personalisasi algoritma menjadi faktor penentu dalam dinamika pembentukan opini politik. Kecepatan penyebaran informasi yang masif memungkinkan opini lokal berkembang menjadi wacana nasional dalam hitungan jam, bahkan menit.

Personalisasi algoritma pada platform media sosial memainkan peran krusial dalam membentuk apa yang disebut sebagai filter bubble atau gelembung informasi. Mekanisme ini menyebabkan setiap pengguna cenderung hanya terpapar pada konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga mempersempit wawasan politik dan memperkuat keyakinan yang sudah ada (pre-existing beliefs). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengakibatkan polarisasi opini yang semakin tajam di masyarakat (Dwiyanti, 2025).

(Faslah, 2024; Rasyadan, 2025), menegaskan bahwa identitas nasional Indonesia yang diwujudkan melalui simbol negara, bahasa persatuan, Pancasila, dan keberagaman budaya sedang menghadapi tantangan serius dalam era globalisasi digital. Generasi muda yang lebih terpapar budaya luar melalui media sosial berpotensi mengalami disorientasi nilai yang berdampak pada cara mereka membentuk dan mengekspresikan opini politiknya.

### **Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik**

Sebagai saluran komunikasi politik, media sosial memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh dan menentukan perilaku politik masyarakat. (Iqbal et al., 2025) mencatat bahwa bagi kekuatan politik yang bertarung dalam pemilihan umum, pemanfaatan media sosial secara efisien dan efektif menjadi keniscayaan untuk memenangkan pertarungan opini publik. Melalui media sosial, substansi pesan-pesan politik dapat disampaikan dengan lebih cepat, mudah dicerna, dan tanpa hambatan geografis.

(Suciati & Nuqul, 2025) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi strategi utama dalam demokrasi digital, memungkinkan pemimpin politik meningkatkan popularitas dan elektabilitas melalui pembentukan citra yang profesional dan humanis. Namun demikian, terdapat fenomena yang mengkhawatirkan berupa munculnya pasukan siber (cyber troops) yang bertugas mendongkrak opini positif bagi kandidat tertentu sekaligus menjatuhkan lawan politik, yang berujung pada fenomena *twitwar* dan perang narasi di ruang digital (Iqbal et al., 2025).

Dalam hal partisipasi perempuan di ruang politik digital, (Suciati & Nuqul, 2025) menemukan bahwa media sosial berfungsi ganda: sebagai alat pemberdayaan yang meningkatkan *self-efficacy* dan sebagai sumber tekanan yang dapat menurunkannya. Perempuan yang ingin terjun ke dunia politik melalui media sosial masih menghadapi hambatan berupa bias gender, serangan siber, dan stereotip negatif yang berpotensi melemahkan kepercayaan diri mereka dalam bersaing di ranah politik.

### **Tantangan Demokrasi di Era Media Sosial**

#### **Disinformasi, Hoaks, dan Polarisasi Politik**

Tantangan paling signifikan yang ditimbulkan oleh media sosial bagi kualitas demokrasi adalah fenomena disinformasi dan penyebaran hoaks secara masif. (Dwiyanti, 2025) mencatat bahwa fenomena penyebaran ujaran kebencian, hoaks, hingga polarisasi politik menunjukkan terjadinya pergeseran makna kebebasan dalam berdemokrasi. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab kini sering kali digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memperkuat segregasi sosial.

(Roza, 2020) memberikan ilustrasi konkret dari dampak polarisasi ini pada konteks pemilu presiden Indonesia 2014 dan 2019, di mana dua kubu pendukung yang fanatik melakukan berbagai cara negatif di media sosial, termasuk fitnah, hoaks, dan hujatan yang melahirkan istilah-istilah merendahkan. Konflik yang bermula dari media sosial tersebut menular ke dunia nyata dan menyebabkan rusaknya kohesi sosial masyarakat secara luas.

Kualitas opini publik yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi turut terdegradasi oleh rendahnya literasi digital masyarakat. (Dwiyanti, 2025) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital membuat ruang publik digital mudah terjebak dalam polarisasi ideologis, di mana informasi yang tidak terverifikasi dan propaganda politik kerap menimbulkan konflik horizontal. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

### ***Konstruksi Identitas Digital dan Implikasinya***

(Suciati & Nuqul, 2025) mengungkapkan bahwa media sosial berpotensi menciptakan identitas digital yang berbeda dari identitas asli penggunanya. Dalam konteks politik, konstruksi identitas yang artificial ini dapat melahirkan representasi palsu tentang opini publik, karena postur dan pandangan yang dikomunikasikan di ruang digital tidak selalu mencerminkan keyakinan otentik si pengguna. Fenomena ini diperparah oleh tekanan sosial dan perbandingan yang tidak sehat yang mempengaruhi cara individu mengekspresikan pandangan politiknya.

(Rasyadan, 2025) menekankan bahwa komunikasi digital tidak sepenuhnya netral, melainkan bisa sarat kepentingan. Figur publik yang menggunakan media sosial untuk mengampanyekan nilai-nilai kebangsaan pun tidak terlepas dari dimensi pencitraan pribadi (image building) yang bertujuan mendapatkan dukungan publik. Realitas ini menuntut audiens untuk memiliki kesadaran kritis dalam mengonsumsi informasi digital, termasuk memahami motif komunikasi di balik konten yang dikemas dengan narasi kebangsaan.

### **Digital Citizenship sebagai Kerangka Pemberdayaan Warga Negara**

#### ***Konsep dan Elemen Digital Citizenship***

Digital citizenship atau kewarganegaraan digital merujuk pada norma-norma perilaku yang sesuai dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi di abad digital (Roza, 2020). Konsep yang dipopulerkan oleh Ribble dan Bailey mencakup sembilan elemen yaitu digital access, digital commerce, digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital law, digital rights and responsibilities, digital health and wellness, dan digital security. Kesembilan elemen ini secara kolektif membentuk profil warga negara digital yang kompeten dan beretika.

Dalam konteks demokrasi partisipatori, (Roza, 2020) menegaskan bahwa kematangan demokrasi akan terjadi apabila warga negara memiliki political efficacy, yaitu kepercayaan kuat dalam diri bahwa mereka dapat melakukan perubahan dengan berpartisipasi. Untuk mencapai kondisi tersebut, warga negara digital harus berwawasan luas, mampu berperan dalam membangun masyarakat, mampu melakukan aktivitas politik dengan kompetensi yang memadai, serta memiliki moral dan kebajikan kewargaan seperti toleransi dan tanggung jawab sosial.

#### ***Revitalisasi Digital Citizenship Berbasis Nilai Pancasila***

(Dwiyanti, 2025) berargumen bahwa di era globalisasi yang sarat dengan perubahan nilai, Pancasila harus kembali diteguhkan sebagai penopang utama demokrasi Indonesia. Revitalisasi nilai Pancasila bukan sekadar upaya ideologis, tetapi

merupakan kebutuhan praktis untuk menjaga stabilitas sosial, integritas politik, dan karakter bangsa. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila akan mampu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab, hak individu dengan kepentingan bersama, serta kemajuan global dengan jati diri nasional.

(Faslah, 2025) menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan prinsip yang di dalamnya terkandung kualitas tertentu, harapan, dan cita-cita yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks digital citizenship, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan etis bagi warga negara dalam berinteraksi di ruang digital, mulai dari cara mengekspresikan pendapat, merespons perbedaan, hingga menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab.

(Hasba, 2025) dalam kajiannya tentang Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi digital harus mampu mempersiapkan peserta didik tidak hanya memahami hak dan kewajibannya secara konvensional, tetapi juga cakap dalam menjalankan peran kewarganegaraan di ruang publik digital. Integrasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dengan literasi digital menjadi kunci dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, menghargai keberagaman, dan berperilaku etis di ruang digital.

### **Strategi Implementasi**

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, setidaknya terdapat tiga jalur strategis untuk memperkuat digital citizenship di Indonesia. Pertama, penguatan pendidikan kewarganegaraan digital di sekolah dan perguruan tinggi. (Roza, 2020) menekankan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan warga negara milenial agar mampu melakukan praktik partisipasi yang menciptakan demokrasi berkeadaban. Perubahan dalam konten dan konteks pembelajaran PKn yang memasukkan dimensi digital citizenship menjadi keniscayaan.

Kedua, kolaborasi antara pemerintah, figur publik, dan komunitas kreatif dalam memproduksi konten digital yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan. (Rasyadan, 2025) menunjukkan bahwa pendekatan naratif berbasis budaya lokal dan storytelling yang dilakukan figur publik terbukti lebih efektif dalam menjangkau generasi muda dibandingkan kampanye formal pemerintah yang bersifat satu arah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dalam komunikasi digitalnya.

Ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum di ruang digital. (Dwiyanti, 2025) menekankan perlunya sinergi antara kebijakan publik dan praktik sosial untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem hukum, pemerintahan, dan media sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelaku penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi politik menjadi komponen penting dalam menjaga kualitas ruang publik digital.

## Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memainkan peran sentral dalam pembentukan opini politik dan mendorong partisipasi politik warga negara Indonesia. Karakteristik media sosial yang mencakup interaktivitas tinggi, kecepatan penyebaran informasi, dan personalisasi algoritma menjadikannya instrumen yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan sikap politik masyarakat. Di satu sisi, media sosial menjadi katalis demokratisasi yang memperluas akses partisipasi publik; di sisi lain, ia rentan dieksploitasi untuk tujuan disinformasi dan polarisasi politik.

Kedua, tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia di era media sosial meliputi fenomena disinformasi dan hoaks, polarisasi politik yang diperparah oleh filter bubble, rendahnya literasi digital masyarakat, serta konstruksi identitas digital yang tidak selalu mencerminkan opini otentik. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa liberalisasi ruang publik digital tanpa diimbangi oleh penguatan nilai moral dan kapasitas kritis warga negara dapat mengancam substansi demokrasi itu sendiri.

Ketiga, digital citizenship berbasis nilai Pancasila merupakan kerangka normatif yang relevan dan krusial untuk mengoptimalkan potensi demokratis media sosial di Indonesia. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem digital, didukung oleh penguatan pendidikan kewarganegaraan digital, kolaborasi pemerintah dengan komunitas kreatif, dan penegakan regulasi yang berkeadilan, merupakan strategi komprehensif untuk membangun warga negara digital yang cerdas, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa implikasi kebijakan. Pemerintah perlu mengintegrasikan materi digital citizenship ke dalam kurikulum pendidikan nasional secara sistematis mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Kementerian terkait disarankan untuk mengembangkan panduan etika bermedia sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan mempromosikannya melalui kampanye digital yang partisipatif dan berbasis storytelling. Platform media sosial perlu didorong untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan disinformasi dan ujaran kebencian melalui kerangka regulasi yang jelas.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan kajian empiris berbasis survei atau eksperimen yang mengukur tingkat digital citizenship warga negara Indonesia secara lebih terukur, serta penelitian komparatif tentang efektivitas berbagai strategi penguatan digital citizenship di tingkat daerah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang beragam.

## Daftar Pustaka

Dwiyanti, S. (2025). Pancasila dan Demokrasi di Indonesia: Meneguhkan Pancasila Sebagai Penopang Demokrasi di Era Globalisasi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19667>

- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. UIN Malang Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hasba, I. B. (2025). Pendidikan Kewarganeraan. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/26058/>
- Iqbal, M., Utami, S., Fadillah, T., Saputra, W., Makmun, F., & Setiawati, R. (2025). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Politik Masyarakat: Dinamika, Tantangan, dan Implikasi Demokrasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi* (Cet. 3). Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Rasyadan, M. I. (2025). Pola komunikasi digital pemerintah dalam menanamkan identitas nasional. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1575–1580.
- Ribble, M., & Bailey, G. D. (2011). *Digital citizenship in schools*. International Society for technology in Education Washington, DC.
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: Menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(2), 190–202.
- Suciati, H., & Nuqul, F. L. (2025). Peran media sosial dalam membangun identitas politik perempuan: Dampaknya terhadap self-efficacy dan partisipasi politik. *Empatheia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 53–63. <https://repository.uin-malang.ac.id/24664/>